

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

1. Gambaran Umum Daerah Kabupaten GunungKidul

1. Sejarah Kabupaten GunungKidul

Pada waktu Gunungkidul masih merupakan hutan belantara terdapat suatu desa yang ditempati oleh beberapa orang pelarian dari majapahit desa tersebut bernama Desa Pongangan, yang dipimpin oleh R. Dewa Katong saudara dari raja Brawijaya. Setelah R Dewa Katong pindah kedesa Katongan maka putranya yang bernama R. Sumorejo membangun Desa Pongangan, sehingga semakin lama semakin maju dan ramai, beberapa waktu kemudian R. Sumorejo pindah ke Karangmojo.

Perkembangan penduduk di daerah Gunungkidul tersebut terdengar sampai Mataram, raja Mataram pada waktu itu mengutus senopati untuk menasehati R. Sumorejo untuk meminta izin terlebih dahulu kepada raja Mataram karena wilayah tersebut masuk daerah kekuasaannya. Namun R. Sumorejo menolak dan terjadilah peperangan hingga dirinya tewas begitu juga dengan anak dan menantunya. Bupati pertama di Gunungkidul adalah Mas Tumenggung Pontjodirjo namun beliau tidak lama menjabat karena adanya pembatasan wilayah antara Sultan dan Mangkunegaran pada tanggal 13 Mei 1831 Gunungkidul menjadi Kabupaten dibawah kekuasaan kasultanan Yogyakarta.

Sedangkan secara yuridis, status Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus

daerahnya sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjadikan Wonosari sebagai ibukota Kabupaten pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan UU no 15 Tahun 1950 peraturan pemerintah No 32 Tahun 1950 pada saat dipimpin oleh KRT Labaningrat.

2. Visi dan Misi Kabupaten Gunungkidul

Visi Gunungkidul

“Gunungkidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera di Tahun 2021”.

Misi Gunungkidul

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut ditempuh melalui enam misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih
2. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
3. Mewujudkan pemantapan sistem dan kelembagaan perekonomian
4. Mewujudkan peningkatan keuangan daerah
5. Mewujudkan penyediaan sarana dan prasarana dasar yang memadai
6. Mewujudkan pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

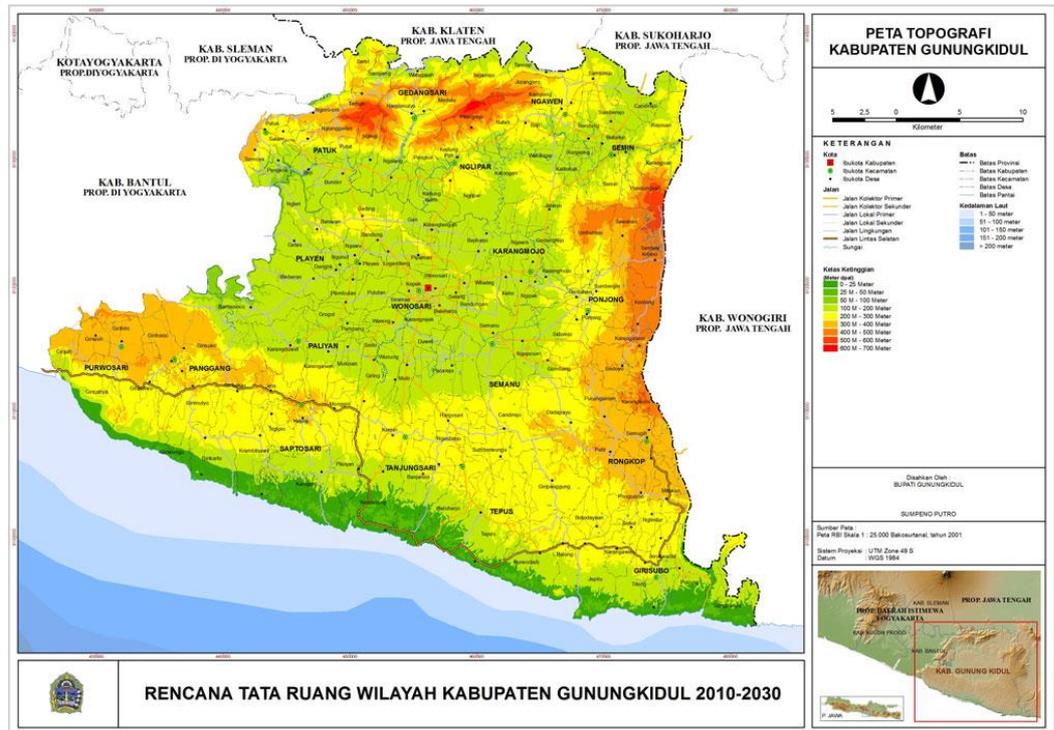
3. Kondisi Geografis Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Ibukotanya Wonosari. Luas wilayah Kabupaten Gunungkidul 1.485.36 km² atau sekitar 46,63 % dari luas wilayah

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Wonosari terletak disebelah tenggara Kota Yogyakarta, dengan jarak 39 km. wilayah Kabupaten Gunungkidul dibagi menjad 18 Kecamatan dan 144 Desa.

Kabupaten Gunungkidul didominasi oleh pegunungan yang merupakan bagian barat pegunungan atau pegunungan kapur selatan yang membentang di selatan pulau jawa ke arah timur hingga kabupaten Tulung agung. Pegunungan kidul yang terbentuk dari batu gamping, menandakan bahwa pada masa lalu kabupaten ini merupakan dasar laut. Penemuan fosil hewan laut purba mendukung anggapan ini. Kawasan ini mulai menjadi daratan akibat pengangkatan-pengangkatan tektonik dan vulkanik sejak kala Miosen.

Gambar 1. Peta Letak Geografis Kabupaten Gunungkidul



Sumber: BPS Gunungkidul

Letak Geografis :

110° 21' sampai 110° 50' Bujur Timur

7° 46' sampai 8° 09' Lintang Selatan

Batas Wilayah Kabupaten Gunungkidul :

Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman (DIY)

Sebelah Utara : Kabupaten Klaten dan Sukoharjo (Jawa Tengah)

Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Sebelah Selatan : Samudra Hindia

Kecamatan-kecamatan di kawasan Kabupaten Gunungkidul memiliki karakteristik yang berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis kawasan

yang terdapat pada dataran tinggi berupa lereng dan hamparan. Kondisi geografis tersebut menyebabkan jarak antar desa menuju kota kecamatan dan ibukota kabupaten memiliki jarak yang berbeda pula.

Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 18 Kecamatan, 144 Desa, 1431 Dusun, 1524 RW, 6822 RT, dan 141 Desa masuk klasifikasi Swadaya dan 3 Desa Swasembada.

Tabel 2.1. Jumlah Kecamatan yang ada di Gunungkidul Tahun 2016 antara lain :

No.	Nama Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT
1.	Kecamatan panggang	6	44	44	271
2.	Kecamatan Purwosari	5	32	32	220
3.	Kecamatan Paliyan	7	50	50	251
4.	Kecamatan Saptosari	7	60	60	335
5.	Kecamatan Tepus	5	83	84	351
6.	Kecamatan Tanjungsari	5	72	71	299
7.	Kecamatan Rongkop	8	100	100	320
8.	Kecamatan Girisubo	8	82	82	258
9.	Kecamatan Semanu	5	106	136	520
10.	Kecamatan Ponjong	11	119	120	517
11.	Kecamatan Karangmojo	9	104	104	479
12.	Kecamatan Wonosari	14	103	151	612
13.	Kecamatan Playen	13	101	101	604
14.	Kecamatan Pathuk	11	72	82	323
15.	Kecamatan Gedangsari	7	67	67	352
16.	Kecamatan Nglipar	7	53	53	286
17.	Kecamatan Ngawean	6	67	67	282
18.	Kecamatan Semin	10	116	120	542

Source: *BPS Kabupaten Gunungkidul*

4. Sosial Kabupaten Gunungkidul

Kondisi sosial budaya Masyarakat Gunungkidul hidup rukun dan damai meskipun terdapat lima agama yang dianut. Mayoritas penduduk Gunungkidul beragama islam, sarana peribadahan tersedia cukup memadai sehingga mendukung masyarakat melakukan ibadahnya sesuai dengan agama yang

dianut. Dukungan dari pemerintah terhadap kehidupan beragama perlu ditingkatkan dengan memberikan fasilitas dan kebebasan bagi umat beragama, selain itu agar hubungan antar umat beragama saling menghormati satu sama lain.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016, antara lain :

No.	Kecamatan	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha
1.	Panggung	28.184	417	225	-	342
2.	Purwosari	20.536	85	20	6	-
3.	Paliyan	32.341	224	116	15	3
4.	Saptosari	37.610	367	12	241	-
5.	Tepus	35.866	496	175	-	-
6.	Tanjungsari	28.217	500	99	4	1

7.	Rongkop	29.470	555	120	-	-
8.	Girisubo	37.610	367	12	241	-
9.	Semanu	55.268	597	1005	3	-
10.	Ponjong	55.193	719	237	1	-
11.	Karangmojo	51.327	2499	1415	-	-
12.	Wonosari	84.219	2889	5071	19	24
13.	Playen	56.095	993	3002	108	3
14.	Pathuk	33.581	243	108	3	-
15.	Gedangsari	38.291	229	462	12	-
16.	Nglipar	35.456	287	86	3	2
17.	Ngawean	32.430	592	818	588	-
18.	Semin	54.472	1148	510	11	39

Source: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gunungkidul

5. Sosial Ekonomi Kabupaten Gunungkidul

Status sosial ekonomi masyarakat itu menggunakan indikator pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan sebagai tolak ukurnya. Individu dengan pendidikan yang tinggi tentu tidak akan mudah terpengaruh oleh penyimpangan sosial seperti narkoba, minuman keras, perjudian, dan prostitusi. Selain itu, individu dengan penghasilan yang layak dimungkinkan untuk menikmati berbagai fasilitas untuk menambah wawasannya, pekerjaan yang layak untuk individu dapat memberikan kenyamanan pada jiwanya.

Sosial ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya kasus penyakit masyarakat yang ada di gunungkidul, orang yang melakukan kasus penyimpangan sosial disebabkan kehilangan pekerjaan dan mata pencahariannya, adapula yang kehilangan sumber pendapatannya secara mendadak karena migrasi, gagal panen, krisis keuangan dan bencana alam. Apabila status sosial ekonomi masyarakat semakin rendah maka kasus penyimpangan yang dilakukan masyarakat semakin tinggi. Dan apabila status

sosial ekonomi masyarakat tinggi maka kasus penyimpangan sosial akan rendah.

6. Pendidikan Kabupaten Gunungkidul

Pendidikan di Kabupaten Gunungkidul sudah cukup memadai dengan adanya sekolah Negeri ataupun swasta yang cukup banyak, ada 22 SMA dan SMK dari jumlah tersebut seharusnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pentingnya bersekolah harus dimanfaatkan dengan baik. Pentingnya pendidikan menjadi faktor utama untuk menunjang kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Kabupaten Gunungkidul dipimpin oleh Hj. Badingah, S.Sos. yang menjabat pada periode 2014-2019. Dengan wakil yakni Dr. Drs. Imawan Wahyudi, M.H. Menurut Sekretariat DPRD Kabupaten Gunungkidul untuk jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gunungkidul sebanyak 45 anggota dari berbagai partai.

Organisasi pemerintah Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang susunan dan pembentukan perangkat daerah yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat daerah, dinas daerah, badan daerah. Perangkat daerah dimaksud bertanggungjawab kepada kepala daerah dan membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.